

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu penulis menyimpulkan bahwa secara umum pengelolaan dana desa (DD) dalam pembangunan fisik di Desa Ekin belum sesuai dengan apa yang ditetapkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal itu dibuktikan dengan hasil analisis terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek Transparansi

Pemerintah Desa Ekin belum memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) yang dipercayakan kepada mereka sehingga masyarakat tidak mengetahui secara rinci pengelolaan dana desa di Desa Ekin. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap masyarakat yang mana semua informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai Dana Desa (DD).

2. Aspek Akuntabilitas

Pemerintah Desa Ekin tidak memberikan laporan pertanggungjawaban secara rinci kepada masyarakat baik secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat Desa Ekin. Pemerintah memberikan laporan hanya kepada Pemerintah Daerah saja tidak kepada masyarakat. Kenyataan ini disampaikan langsung oleh kepala desa yang menyatakan bahwa laporan hanya ditujukan kepada pemerintah daerah bukan kepada masyarakat kecuali di pertengahan maupun akhir tahun serta dapat dilihat dari media pertanggungjawaban yang dibiarkan kosong tak terpakai.

3. Aspek Partisipasi

Partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Ekin hanya berorientasikan pada uang bukan karena kesadaran masyarakat untuk membangun desa mereka sendiri. Hal ini dapat berkaitan dengan aspek-aspek sebelumnya dimana kurangnya keterbukaan serta tidak adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat membuat masyarakat enggan bekerjasama dengan pemerintah Desa Ekin.

4. Aspek Tertib dan Disiplin Anggaran

Pembuatan administrasi Desa Ekin sudah sangat baik, namun dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih banyaknya pembangunan fisik yang tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang penulis dapatkan di atas berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan fisik di Desa Ekin maka saran yang ingin penulis berikan yaitu :

1. Aspek Transparan

Pemerintah Desa harus bersikap terbuka kepada masyarakat dalam mengelola dana desa yang dipercayakan kepada mereka sehingga tercipta rasa saling percaya diantara masyarakat dan pemerintah desa dengan cara memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya pembangunan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban beserta biaya yang digunakan.

2. Aspek Akuntabilitas

Pemerintah Desa harus bisa memberikan pertanggungjawaban secara detail kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa serta pelaksanaan pembangunan fisik desa di hadapan forum musyawara desa.

3. Aspek Partisipasi

Permerintah Desa harus bisa membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat dan membuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembanguna sehingga masyarakat dapat bekerja dengan sepenuh hati dan dengan penuh kesadaran untuk membangun desa mereka.

4. Aspek Tertip dan Disiplin Anggaran

Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan komitmen kerja dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sehingga pembangunan fisik desa dapat berjalan sesuai waktu yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adrianto Nico, 2007: *Good e-Goverment: Tansparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Goverment*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Annisaningrum. 2010: *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan*.
- Atmadja, Tungga Anantawikrama: 2013, *Manajemen Sektor Publik*, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Agustinus Hermino, 2013: *Asesmen Kebutuhan Organisasi*, Jakarta: PT Gramedia
- Bennis Waren, dkk, 2009: *Bagaimana Pemimpin Menciptakan Budaya Keterbukaan*, Jakarta Libri.
- Faisal Sanapiah, 2010: *Format – Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hermino Agustinus, 2013: *Asesmen Kebutuhan Organisasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Iskandar, 2009: *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Gaung Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2004: Jakarta : Balai Pustaka.
- Moleong JLexi, 2010: *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Minarti Sri, 2011: *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, jogjakarta: AR- Ruzz Media.
- Mardiasmo, 2002: *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta.
- Randi R Wrihantolo : 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*, Jakarta : Elekx Media Komputindo.
- Sugiyono; 2009: *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, 2013: *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Sutedi Adrian, 2009: *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Sule Tisnawati, 2009: *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media

Goup.

Tahir Arifin, 2015: *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alvabeta.

Usman Nurdin, 2002: *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang - Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014.

PermenDesa Nomor 22 Tahun 2016

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang – undang Nomor 9 Tahun 1999

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008

Jurnal

Amarudin, dkk, 2012, dalam jurnal Ilmu Pemerintahan: *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalena Kabupaten Luwu Timur*, Universitas Muhammadiyah Makasar.

Faridah, 2015: *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Ejournal Ilmu dan Riset Akuntansi vol. 4, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya.

Iqsan, Ejournal Ilmu Pemerintahan, 2016: *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*, Universitas Mulawarman.

Pasanbu. FJ, 2011: *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Akseibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*. Tesis, Medan, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara.

Werimon, dkk, 2007: *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan*

Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), Makassar.

Verra Zen Via, 2015, dalam Jurnal Ilmu Administrasi: *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumuknas Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011- 2013)*, Fisip Universitas Jember.

Internet

<http://Seknafitra.PengertianTataKelolaKeuangan.Blogspot.Com>, diakses tanggal 20 mei 2017

PEDOMAN WAWANCARA

I. PENJELASAN UMUM

1. Penelitian ini semata-mata bertujuan ilmiah dalam kaitannya dengan tugas akhir.
2. Hasil penelitian ini tidak dipublikasikan kepada khalayak atau pihak manapun.
3. Mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk memberikan jawaban secara tepat dan jujur demi kelancaran dan ketepatan analisis hasil penelitian.
4. Atas kesediaan bapak/ibu/saudara/i meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran peneliti menyampaikan terima kasih.

II. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis kelamin :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat :

III. DAFTAR PERTANYAAN

A. Transparansi

- a. Apakah pemerintah Desa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai RPJMDes, RKPDDes, dan RAPBDes?

- b. Apakah ada kerjasama pemerintah untuk inform dengan media massa dan lembaga non pemerintahan untuk meningkatkan arus informasi?
- c. Apakah ada kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat akses informasi mengenai RPJMDes, RKPDDes, dan RAPBDes?

B. Akuntabilitas

- a. Bagaimana cara pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam setiap kegiatan kerja Desa?
- b. Bagaimana pemerintah menyediakan informasi mengenai proses pembuatan keputusan bagi warga yang membutuhkan?

C. Partisipasi

- a. Apakah masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan musrembangDes?
- b. Adakah tanggungjawab tertentu yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan di Desa?
- c. Bagaimana model pengawasan masyarakat terhadap kerja pemerintah?

D. Tertip dan Disiplin keuangan

- a. Bagaimana model administrasi yang di buat di Desa?
- b. Apakah ada laporan tertulis atau lisan mengenai kinerja pemerintah kepada masyarakat?

Catatan :

Pertanyaan yang dibuat diatas merupakan pertanyaan penuntun yang akan berkembang pada saat penelitian.